

**PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM
MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN PASAMAN
BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Zelvia Amelia

2010012111061

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 23/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 23/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Zelvia Amelia
NPM : 2010012111061
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Memberikan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Pasaman Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Helmi Chandra SY, S.H.,M.H

(Pembimbing)  (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara




(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)


(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Zelvia Amelia¹, Helmi Chandra¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: zelviaa00@gmail.com

ABSTRAK

The Manpower Service (Disnaker) is responsible for developing, controlling and supervising the field of employment. Based on Article 5 of Law Number 13 of 2003, it is explained that the Manpower Office is also responsible for providing broad employment opportunities and providing training to prospective workers without discrimination. The problem formulation is as follows: 1) What are the Duties and Authorities of the Manpower Service in West Pasaman Regency? 2) What are the obstacles that hinder the Manpower Department in dealing with employment problems in West Pasaman Regency? 3) What are the efforts made by the Manpower Department to deal with employment problems in West Pasaman Regency? The type of research used is sociological law, namely this method relates law to efforts to achieve goals and meet concrete needs in society. Research results: 1) In the Placement Sector, especially in Job Expansion and Opportunities, there are duties and authorities including planning, implementing, coordinating, controlling and reporting activities. 2) obstacles that arise: a. Limited Skills or Abilities in the Field of Work, b. Limited budget, c. Limited Facilities and Infrastructure. 3) Efforts made by the Manpower Department to deal with employment problems in West Pasaman Regency: a. Provide job training. b. Propose additional budget to the DPRD. c. Maximize existing facilities.

Keywords: Manpower Department, Manpower, Employment.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi pemerintahan yang dikenal sebagai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bertanggung jawab untuk membangun, mengontrol, dan pengawasan dibidang ketenagakerjaan. Disnaker juga bertanggung jawab dalam memberikan kesempatan kerja yang luas dan memberikan pelatihan kepada calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan

permintaan para pencari kerja. Perbedaan antara Tenaga Kerja dan Pekerja, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, termasuk di dalamnya bekerja pada sektor informal, misalnya wiraswasta/pedangan yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan Pekerja adalah mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan lain.¹

¹ Whimbo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta, hlm 4

Pemerintahan Indonesia memberikan kebebasan kepada semua warga negaranya untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Peningkatan jumlah tenaga kerja sering kali merupakan tantangan ekonomi yang sulit diatasi oleh pemerintah. Karena, pertumbuhan populasi yang tinggi pemerintahan tidak melakukan apa-apa untuk menyediakan pekerjaan, sehingga tenaga kerja yang tersedia tidak dapat diserap sepenuhnya. Akibatnya, munculah pengangguran.

Oleh karena itu penulis telah melakukan penelitian di dinas tenaga kerja dengan judul **“PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja Kendala-Kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan Kesempatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan Kesempatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas

Tenaga Kerja di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk menganalisa apa saja Kendala-Kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan Kesempatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan Kesempatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari yaitu data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen dan Wawancara.

4. Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Pasaman Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah terdapat pada Pasal 3 Angka 21.

Kesempatan Kerja memiliki Tugas dan wewenang diantaranya:

1. Merencanakan

Dalam penerapannya Disnaker merencanakan apa kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Melaksanakan

Dengan dilaksanakannya sosialisasi Disnaker akan memberikan arahan bagaimana masyarakat akan mendapatkan pekerjaan.

3. Mengkoordinasi

Disnaker mengkoordinasikan bagaimana prosedur atau syarat pendaftaran Angkatan kerja yang akan diberikan pelatihan.

4. Laporan kegiatan

Disnaker melaporkan bagaimana perkembangan dalam masa pelatihan kerja.

B. Kendala-Kendala yang Menghambat Dinas Tenaga Kerja Dalam memberikan Kesempatan kerja di kabupaten Pasaman Barat

1. Keterbatasan Keahlian atau Kemampuan dalam Bidang Pekerjaan
2. Keterbatasan Anggaran yang Dimiliki
3. Keterbatasan Sarana dan Prasana

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Dinas tenaga Kerja Dalam Memberikan Kesempatan Kerja Di kabupaten Pasaman Barat

1. Memberikan Pelatihan Kerja

Disnaker mengambil Tindakan atau upaya kepada masyarakat atau seseorang yang belum mempunyai keahlian atau kemampuan dengan cara memberikan pelatihan kerja kepada

masyarakat atau seseorang tersebut.

2. Mengusulkan Tambahan Anggaran ke DPRD

Disnaker mendapatkan Anggaran dari prokir DPRD atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Memaksimalkan Sarana yang ada

Untuk mencukupi kekurangan itu Disnaker memaksimalkan peralatan yang ada dalam melakukan pelatihan kerja.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Disnaker Pasaman Barat dalam menjalankan wewenang dan tugas nya sudah cukup baik.
2. Kendala-Kendala Yang Menghambat Dinas Tenaga Kerja Dalam Memberikan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Pasaman Barat
 - a. Keterbatasan keahlian atau kemampuan seseorang pencari kerja yang ingin bekerja
 - b. Keterbatasan anggaran yang kurang mencukupi untuk memfasilitas dalam melayani masyarakat.
 - c. Keterbatasan sarana prasarana yang dialami oleh Disnaker tentunya memberi indikasi terhadap pelaksanaan pelatihan yang kurang maksimal.
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Memberikan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Pasaman Barat
 - a. Memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat yang

belum memiliki basic keahlian.

- b. Mengusulkan Tambahan Anggaran ke DPRD, jika anggaran tersebut sudah keluar Disnaker harus mampu mempertimbangkan anggaran untuk kepentingan yang lebih prioritas.
- c. Memaksimalkan Sarana yang ada, Disnaker berusaha untuk memenuhi peralatan yang dibutuhkan masyarakat secara berkala tidak sekaligus semua peralatan yang dibutuhkan bisa diberikan.

B. Saran

1. Disnaker harusnya lebih banyak melakukan sosialisasi terkait pelatihan kerja kepada masyarakat, agar jumlah masyarakat yang mendaftar dan mengikuti pelatihan kerja semakin meningkat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Disnaker harusnya lebih meningkatkan lagi terkait sumber dana anggaran agar masyarakat yang membutuhkan modal bisa tercukupi dengan maksimal dan menyeluruh.
3. Selain itu, terkait sarana dan prasarana harus ditingkatkan lagi agar kegiatan pelatihan terlaksana dengan lebih baik dan permintaan peralatan masyarakat bisa terpenuhi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-18, Raja Grafindo Persada, Depok.

Maiyestati, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan xii. Bung Hatta University Press, Padang.

Whimbo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke -1, Visimedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

C. Sumber lain

Wawancara dengan ibu Pitriani, sebagai Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 28 Desember 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H Dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian HTN, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Elyana Novira, S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.